

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Azizah, S. N. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwiatmoko, H., A., dkk. (2020). *Peran Angkutan Kereta Api Komuter dalam Meningkatkan Perekonomian di Wilayah Gerbang Kertasusila*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- H., Achmad, Aminudin, M. (2023). *Transformasi Organisasi Kereta Api Indonesia (KAI)*. Penerbit Adab.
- Hartini, R. (2012). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: PT. Citra Mentari.
- Herlina Ratna, S. N. (2025). *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, cetakan kedua*. Bandung: Alfabeta.
- Kolopaking, A. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S. S., & Haq, H. S. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Cet. Ketiga puluh sembilan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086).

Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 tentang Syarat-Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang.

## **Artikel Jurnal**

Elenabella, V., & Giawa, F. N. (2025). Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).

Febriansyah, R., dkk. (2024). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 597-604.

Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.

Putra, Rengga Kusuma, dkk. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200-2206.

Riwu, A. R. (2025). Tanggung Jawab Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Menggunakan Ekspedisi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 31-48.

Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173-188.

Sari, I. (2020). Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53-70.

Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8(1).

Sriastuti, N. (2015). Kereta api pilihan utama sebagai moda alternatif angkutan umum massal. *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 4(1), 26-34.

Sunge, M. (2012). Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata. *Jurnal Inovasi*, 9(02).

### **Lain-Lain**

Ainunisya, N. (2023). Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Kereta Api dan Pengangkutan Barang. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dahlan, R. I. A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Darat Antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang Secara Online. *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hastuti, Y. S. (2009). Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006. *Doctoral Dissertation*, Universitas Indonesia.

Nickyta Firmaniar. (2014). Penerapan Prinsip Fault Liability Oleh Pengangkut Terhadap Penumpang Tidak Berkarcis Berdasarkan Pasal 491 KUHd dan Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Studi Di P.T. Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon). *Doctoral dissertation*, Brawijaya University.

Putra, L., A. (2013). Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Pengangkutan Barang melalui Pesawat Udara Negara. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*.

Ramadhan, M. I. (2024). Kajian Standar Operasional Prosedur Pelayanan Minimum Stasiun Kereta Api. *Doctoral dissertation*, Universitas Sangga Buana YPKP.

Rohmah, H. N. M. (2019). Analisis hukum layanan penumpang kereta api perspektif Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan masalah mursalah: Studi di Stasiun Kotabaru Malang. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Rohmanto, Y. (2022). Dampak Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera Selatan Terhadap Perekonomian Di Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Lampung.

Sagara, I, P., P. (2010). Penerapan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Bani No. 296/II/ARB-BANI/2009 antara PT. Istana Noodle House dan PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk.). *Tesis*, Universitas Indonesia.

Setyamika, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang dengan Tiket Tanpa Kursi pada Kereta Api Lokal Dhoho Atas Perbuatan Melanggar Hukum PT. Kereta Commuter Indonesia. *Doctoral dissertation*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Yuniyanti, R. (2008). Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melanggar PT. Telekomunikasi Seluler). *Skripsi*, Universitas Indonesia.

<https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaranpembangunan-nasional>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025, pukul 10.59 WIB.

<https://redigest.web.id/2023/06/diduga-sengaja-dua-orang-naik-ka-argo-parahyangan-tanpa-tikethingga-plered/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025, pukul 10.15 WIB.

<https://travel.kompas.com/read/2024/12/27/131005527/oknum-railfans-naik-kereta-tanpa-tiketini-caranya-lolos-pemeriksaan-boarding>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025, pukul 10.42 WIB.

<https://www.its.ac.id/news/2022/03/18/kereta-api-sebagai-moda-transportasi-massal-masadepan/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025, pukul 11.05 WIB.

Wawancara Bapak Sugeng selaku Petugas Divisi Humas, Stasiun Gubeng, DAOP 8 Surabaya, Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.